

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter<sup>1</sup> yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Dapat kita lihat dari pengertian demokrasi tersebut secara normative, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat<sup>2</sup>.

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga

<sup>1</sup> Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York : Harper., 1947.

<sup>2</sup> Mochtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal 43.

negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik.

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky yang dikutip oleh Damsar di dalam “*Pengantar Sosiologi Politik*” dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum<sup>3</sup>. Menurut Max Weber masyarakat melakukan aktivitas politik karena, *pertama* alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. *Kedua*, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. *Ketiga*, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. *Keempat*, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Miriam Budhiardjo mendefinisikan<sup>4</sup>, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

<sup>3</sup>Herbert Mc.Closky, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010, hal.180.

<sup>4</sup> Miriam Budhiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia, 1982, hal 12.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik di atas, dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kita ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam system pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut<sup>5</sup>.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yakni<sup>6</sup> :

- Apatist, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik
- Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.
- Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.
- Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas,

<sup>5</sup> Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Press, 1995, hal.5-6.

<sup>6</sup> [jurnal.dikti.go.id](http://jurnal.dikti.go.id)

dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya<sup>7</sup>. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu.

Kegiatan pemilihan di Indonesia untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dengan system proporsional yang berlangsung dalam suasana demokratis. Adanya pemilu pada tahun 1955 diawali dengan adanya partai politik. Usai kemerdekaan, banyak partai politik dibentuk oleh para pemimpin politik Indonesia menyusul dikeluarkannya maklumat yang di sahkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Isi dari maklumat tersebut adalah himbauan untuk melaksanakan pemilu. Pada waktu itu Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945<sup>8</sup>. Adapun bunyi Maklumat Pemerintah 3 November 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
- 2) Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat. Pemilihan ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Januari 1946.

Dekrit yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada November 1945 tersebut mendorong para pemimpin politik untuk membentuk partai politik. Feith<sup>9</sup> mengemukakan tujuan maklumat ini adalah “menyediakan perwakilan langsung bagi semua kelompok penting di masyarakat Indonesia berdasarkan sistem perwakilan proporsional”. Dapat dilihat bahwa maklumat wakil presiden pada waktu itu menunjukkan bahwa negara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan suatu sarana yang dapat mewakili rakyat, yang

<sup>7</sup>Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung : Fokusmedia, 2007, hal.173-174.

<sup>8</sup> <http://www.indopubs.com>

<sup>9</sup>Feith ,Herbert and Lance Castle (ed), *Indonesian Political Thinking* dalam Kuskridho Ambardi, 2009, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), hal.46.

pada akhirnya dapat menciptakan kemakmuran dan demokrasi di Indonesia, yaitu partai politik. Partai politik sebagai salah satu sarana berpartisipasi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengaturan konflik<sup>10</sup>.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip di dalam *Journal of Democracy*<sup>11</sup>, bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektivan. sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur<sup>12</sup>.

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 26 partai politik. Pada pemilu 1971 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 10 partai politik, yaitu Golkar, Nahdatul Ulama (NU), Parmusi, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba. Pada pemilu 1977 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). Pada pemilu 1982 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1987 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1992 jumlah partai politik peserta

<sup>10</sup> Miriam Budhiardho, *Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, hal.202-209.

<sup>11</sup> Elkit, J. dan Severson., *What Makes Election Free and Fair?. Journal of Democracy*, page.8 dalam Prihatmoko, Joko J., *Mendemokratiskan PEMILU*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hal. xiii.

<sup>12</sup> Syamsuddin Haris. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988, hal.152.

pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1997 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1999 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai politik<sup>13</sup>. Pada pemilu 2004 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 24 partai politik. Dan terakhir pemilu 2009 dengan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 44 partai politik, termasuk 6 partai lokal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan atau memilih presiden/wakilnya. Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam hal ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah<sup>14</sup>.

Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan presiden tahun 2009 yang lalu. Dimana rakyat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan presiden secara langsung untuk memilih siapa yang akan menduduki pemerintahan untuk lima tahun ke depannya.

Bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi. *Pertama*, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. *Kedua*, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan

<sup>13</sup> A.Rahman.H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal.154-157.

<sup>14</sup> Samuel.P.Huntington, dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal.6.

dan meningkatkan pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi social kemasyarakatan (ormas) dan organisasi social politik (orsospol) merupakan contoh dari fungsi politik lain<sup>15</sup>.

Partisipasi politik dan perilaku memilih adalah paket dalam diskusi pemilu. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sedang perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Oleh karena itu dapat dilihat hubungan yang erat antara demokrasi, partisipasi politik, pemilihan umum, partai politik dan perilaku memilih.

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur. Keterlibatan masyarakat di dalam Pemilihan Umum Presiden pada 8 Juli 2009 yang lalu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin untuk lima tahun mendatang. Di Kelurahan Dataran Tinggi ini terdapat 9 (sembilan) TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3620 orang. Penulis tertarik untuk meneliti di daerah ini karena masyarakatnya yang heterogen dan cenderung aktif di dalam kampanye (wawancara dengan kepala lingkungan). Penulis ingin melihat bagaimana partisipasi politik yang tercermin didalam masyarakat Kelurahan Dataran Tinggi ini, baik itu melalui pemungutan suara, kampanye, dan partai politik yang akhirnya akan menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Dataran Tinggi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis perilaku politik untuk melihat partisipasi politik masyarakat. Perilaku politik itu dilihat sebagai sebuah alat analisis untuk melihat bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum, baik itu melalui pemberian suara (voting), keikutsertaan seseorang dalam kampanye, dan keanggotaan seseorang dalam partai politik di dalam Pemilu Presiden tahun 2009.

<sup>15</sup>Sudijono, Sastroatmodjo, *op.cit.*, hal.86.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana perilaku politik yang tercermin dalam partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur pada Pemilu Presiden 2009?”

## **3. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka penulis membuat batasan masalah yaitu batasan masalah berupa studi partisipasi politik, pemilihan umum, perilaku politik dan perilaku pemilih.

## **4. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

### **4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Dataran Tinggi kecamatan Binjai Timur dalam pemilu Presiden 2009. Partisipasi masyarakat ini dapat dilihat melalui pemungutan suara (voting), kampanye dan partai politik, sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan, yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki partisipasi masyarakat di Kelurahan Dataran Tinggi.



## **4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu politik, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan informasi mengenai hubungan antara partisipasi politik, pemilihan umum dan perilaku politik masyarakat, serta bagi penulis sendiri agar dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan dari teori-teori politik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis tentang pemilu, perilaku politik, partisipasi politik dan perilaku pemilih sehingga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan civitas akademika.
3. Secara operasional penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature bagi Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Dalam Negeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat untuk melihat bagaimana partisipasi dan perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2009 sehingga untuk ke depannya perolehan suara dari masyarakat itu dapat dimaksimalkan.

## 5. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah unsur yang paling penting di dalam sebuah penelitian, karena pada bagian ini peneliti akan mencoba menjelaskan fenomena sosial yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep<sup>16</sup>.

Oleh karena itu penulis akan memaparkan teori-teori tersebut ke dalam kerangka teori yang merupakan landasan berfikir dalam menggambarkan masalah penelitian. Teori-teori yang relevan dengan masalah ini adalah antara lain :

### 5.1 Teori Partisipasi Politik

#### 5.1.1 Defenisi Partisipasi Politik

Dalam bukunya, *Political Sciology : A Critical Introduction*, Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi oleh Damsar, memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan<sup>17</sup>”.

Beberapa sarjana merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut<sup>18</sup> :

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3S, 1989, hal.37.

<sup>17</sup> Keith Fauls, *Political Sciology : A Critical Introduction* dalam Damsar, *Pengantar Sosioogi Politik* 1990, hal 180.

<sup>18</sup> [mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA\\_POLITIK](http://mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA_POLITIK)

TABEL 1

## DEFENISI PARTISIPASI POLITIK MENURUT BEBERAPA AHLI

Sarjana	Konsep	Indikator
<b>Kevin R. Hardwick</b>	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah</li> <li>2. Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.</li> </ol>
<b>Miriam Budiardjo</b>	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah ( <i>public policy</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa kegiatan individu atau kelompok</li> <li>2. Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.</li> </ol>
<b>Ramlan Surbakti</b>	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.  Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik</li> <li>2. Dilakukan oleh warga negara biasa</li> </ol>
<b>Michael Rush dan Philip Althoft</b>	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik</li> <li>2. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi</li> </ol>
<b>Huntington dan Nelson</b>	Partisipasi politik ... kegiatan warga negara preman ( <i>private citizen</i> ) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan</li> <li>2. Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik</li> <li>3. Dilakukan oleh warga negara preman (biasa)</li> </ol>
<b>Herbert McClosky</b>	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa kegiatan-kegiatan sukarela</li> <li>2. Dilakukan oleh warga negara</li> <li>3. Warga negara terlibat dalam proses-proses politik</li> </ol>

Sumber: [mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA\\_POLITIK](http://mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA_POLITIK)

Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara. Dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negara nya maka semakin baik pula<sup>19</sup>, dengan kata lain masyarakat merasa terbeban untuk ikut berpartisipasi. Karena tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Hal ini berarti masyarakat sebagai pemilik mandate peduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hal ini dianggap kurang baik, karena masyarakatnya tidak peduli terhadap negaranya dan cenderung bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari defenisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik<sup>20</sup> :

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>20</sup> Kuskridho Ambardi, *op.cit.*, hal. 288-290.

3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
6. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

### **5.1.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik**

Secara umum bentuk-bentuk partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut :

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public, mengajukan alternative kebijakan public yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

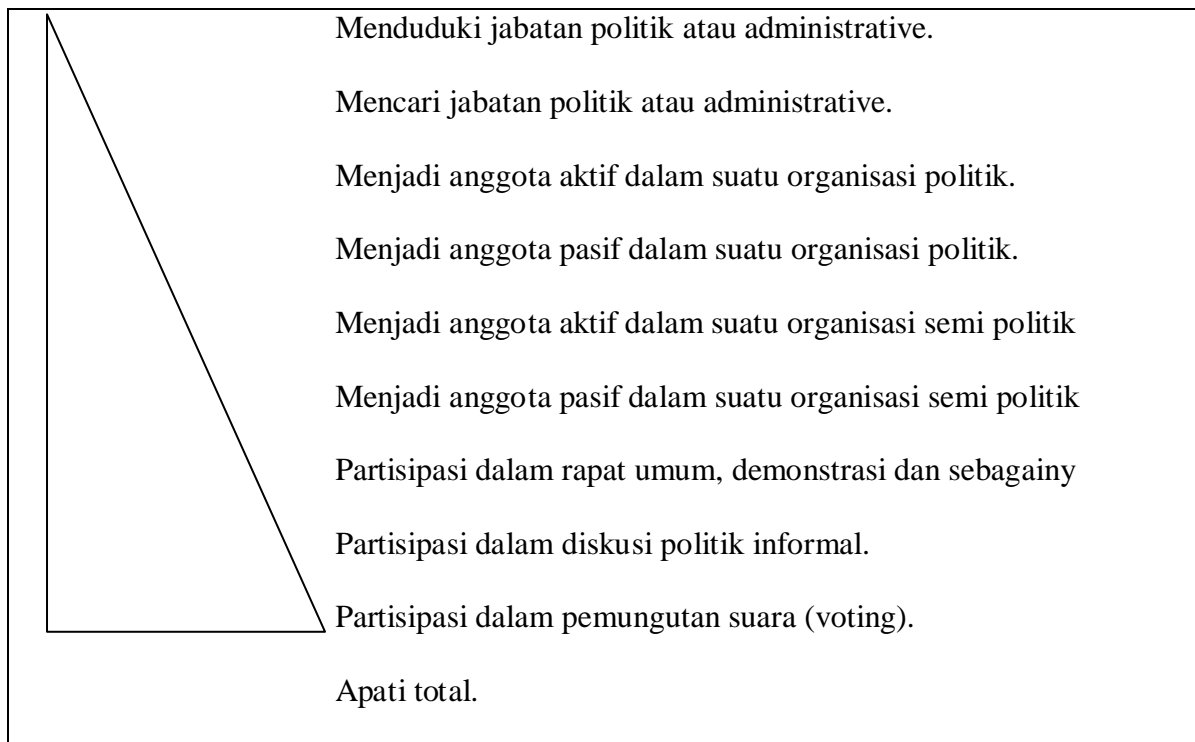
Para ahli sosiologi politik telah merumuskan berbagai bentuk partisipasi politik. Berikut disajikan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut beberapa ahli.

### **1. Michael Rush dan Philip Althoff**

Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip oleh Damsar dalam *Pengantar Sosiologi Politik* mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administrative. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh Bagan Hierarki Partisipasi Politik<sup>21</sup>, dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

<sup>21</sup> Rush, Althoff, *Pengantar Sosioogi Politik* dalam *Pengantar Sosioogi Politik* oleh Damsar *Op.cit.*,hal. 185.

**Gambar I**  
**Hierarki Partisipasi Politik**



*Sumber: Rush dan Althoff (2003) dalam Damsar (2010), hal. 185.*

## **2. Samuel P.Huntington dan Juan M.Nelson**

Samuel P.Huntington dan Juan M. Nelson<sup>22</sup> menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

1. Kegiatan Pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 188-190.

mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi, merupakan tindakan peorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
5. Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

### **3. Gabriel A. Almond**

Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang disunting oleh Mas'ood dan MacAndrews dalam Damsar<sup>23</sup>, Almond membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu :

1. Partisipasi Politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal“ dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi dapat dilihat pada tabel berikut :

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 186.



TABEL 2  
BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK

Konvensional	Non Konvensional
☞ Pemberian suara ( <i>voting</i> )	☞ Pengajuan Petisi
☞ Diskusi Politik	☞ Berdemonstrasi
☞ Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	☞ Konfrontasi
☞ Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	☞ Mogok
	☞ Tindak kekerasan politik terhadap hartabenda(perusakan,pengeboman,pembakaran)
	☞ Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikkan,pembunuhan) perang gerilya dan revolusi.

*Sumber: Almond dalam Mas' oed dan MacAndrews (1981) dalam Damsar (2010), hal. 186*

## 5.2 Teori Pemilihan Umum

### 5.2.1 Pemilihan Umum

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative goverment*)<sup>24</sup>. Pemilihan umum disebut juga dengan ‘*political market*’ sebagaimana yang diungkapkan Indria Samego<sup>25</sup>, artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang

<sup>24</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal. 33.

<sup>25</sup> Samego Indria, *Book Review Ekonomi Politik*, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta. 2000.

menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Adapun tujuan pemilihan umum<sup>26</sup>, menurut Undang-Undang No.23 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas pemilu menurut UU No.23 tahun 2003, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden<sup>27</sup> meliputi :

1. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

3. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.

4. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

<sup>26</sup> *Op.cit.*,hal.148.

<sup>27</sup> *Op.cit.*, hal. 150

## 5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### **5.2.2 Sistem Pemilihan Umum**

#### 1) Sistem Distrik

Kriteria utama dari sistem distrik ini adalah wilayah negara dibagi-bagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Ciri pokok dari sistem pemilihan distrik ini adalah yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau yang dicalonkan oleh partai politik dari suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Jadi, hubungan antara si pemilih dengan si calon cukup dekat<sup>28</sup>.

System distrik ini mempunyai kelemahan yaitu :

1. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.

<sup>28</sup> Nazzarudin, Sjamsuddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia: Jakarta, hal. 143.

2. Sistem ini kurang representative dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.

Disamping kelemahan-kelemahan tersebut diatas, system ini juga memiliki kelebihan :

1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik.
2. Sistem ini lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
4. Sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan.

## 2) Sistem Perwakilan Berimbang

Dalam system ini setiap suara yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem ini memiliki kekurangan yaitu :

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. System ini tidak menjurus pada proses integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat, mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. System ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.

2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang.
3. Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Adapun kelebihan dari system ini adalah setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan keccil pun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.

### **5.2.3 Pemilihan Umum di Indonesia**

Sejak kemerdekaannya, bangsa Indonesia sudah mengadakan sepuluh kali pemilihan umum (pemilu). Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009<sup>29</sup>.

#### **5.2.3.1 Pemilu Orde Lama**

Terlaksananya pemilu 1955 ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang. Hastrat pemerintah untuk melaksanakan pemilu ang muncul sejak Desember 1945 itu, baru dapat dilaksanakan sepuluh tahun kemudian. Melalui berbagai perdebatan, pergantian beberapa cabinet dan pembahasan terhadap beberapa naskah perundang-undangan pemilu, akhirnya pemilu yang didambakan itu terlaksana juga. Sebagai proses awal pelaksanaan pemilu, PPS melakukan pendaftaran pemilih sejak 17 bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Jumlah pemilih yang tercatat ketika itu ada 43.104.464 orang. Diperhitungkan sebanyak 91,45% dari jumlah pemilih tercatat telah dating ke TPS yang berjumlah 95.532 buah. Daerah yang tingkat partisipasinya paling rendah adalah daerah Sulawesi Selatan/Tenggara, yaitu 71,4% dari jumlah yang terdaftar. Dari masyarakat yang melaksanakan hak pilih diketahui

<sup>29</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

sejumlah 37.875.299 orang telah melakukannya dengan sah, yaitu 87,65% dari jumlah pemilih terdaftar. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 257 buah. Jumlah ini berasal dari ketentuan bahwa masing-masing anggota DPR yang dipilih mewakili 300.000 orang. Dari jumlah kursi sebanyak 275, terdapat anggota DPR yang diangkat yaitu 3 kursi untuk Irian Barat, 6 kursi mewakili golongan Tionghoa, 3 golongan Arab dan 3 kursi mewakili golongan Eropa, sehingga jumlah akhir anggota DPR menjadi 272 orang.

Pemilu 1955 menghasilkan empat partai politik yang meraih kemenangan besar yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi). Pemilu ini juga membuktikan bahwa calon perorangan tidak banyak menapat dukungan dari pemilih. Disini terlihat bahwa rakyat menganggap partai politik masih merupakan tumpuan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan masih belum menerima perjuangan melalui perorangan.

### **5.2.3.2 Pemilu Orde Baru**

Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu-pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini seringkali disebut dengan pemilu orde baru. Sesuai peraturan fusi partai politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti oleh tiga partai politik. Yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tanggal 2 Mei 1977 diselenggarakan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya). Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar. Begitu juga hasil Pemilu 1982. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Begitu juga dengan Pemilu pada tahun 1987 dan Pemilu 1992. Pada tahun 1997 dilaksanakan kembali Pemilihan Umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. Pemenangnya adalah Golkar.

**TABEL 3**  
**PEROLEHAN KURSI DPR HASIL PEMILU 1977-1997**

No	Partai Politik	1977	1982	1987	1992	1987
1.	Golkar	232	242	299	282	325
2.	PPP	99	94	61	62	89
3.	PDI	29	24	40	56	11
	Total	360	364	400	400	425

*Sumber: diolah dari <http://www.kpu.go.id> dalam Hanta Yuda (2010), hal. 117.*

### 5.2.3.3 Pemilu Reformasi

Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik. Hasil presentase suara maksimum Pemilu 1999 yang diperoleh PDIP adalah 33,76%. Disusul oleh tujuh partai besar lainnya yaitu Partai Golkar 22,46%, PKB 12,62%, PPP 10,72%, PAN 7,12%, PBB 1,94%, dan PKS 1,36%. pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Perolehan suara maksimal yang dicapai Partai Golkar sebagai pemenang pemilu hanya 21,58%, disusul PDIP 18,53%, PKB 10,47%, dan PAN 6,44%. Komposisi DPR hasil Pemilu 2004 tertinggi yang diperoleh Partai Golkar hanya 128 kursi, disusul PDIP 109 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 55 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, PBR 14 kursi, PDS 13 kursi, dan PBB 11 kursi. Sedangkan partai lain hanya memperoleh dibawah 10 kursi.

Hasil pemilu 1999 dan Pemilu 2004 tidak berhasil melahirkan sebuah partai mayoritas seperti halnya Golkar di Era Orde Baru. PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999 dan Partai Golkar pemenang Pemilu 2004 tidak menjadi pemenang secara mutlak dan tidak memiliki suara secara mayoritas di DPR.

## 5.3 Teori Perilaku Politik

### 5.3.1 Defenisi Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik<sup>30</sup>. Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik dapat dijumpai didalam negara misalnya, ada pihak yang memerintah dan yang diperintah. Pada dasarnya, manusia yang melakukan kegiatan dibagi menjadi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut<sup>31</sup>.

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta system kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sikap politik. yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terjadap objek lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widya Sarana, 1992, hal.131.

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> Sudijono, Sastroatmodjo, *op.cit.*, hal. 4.



Perilaku politik tidaklah sesuatu yang dapat berdiri tegak sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan hal yang lain. Salah satu hal yang penting adalah sikap politik. sikap dan perilaku sangat erat hubungannya, namun keduanya dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu. Sikap belum merupakan tindakan tetapi masih berupa suatu kecenderungan.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan<sup>33</sup>, perilaku politik adalah:

*“Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi)”*.

### **5.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik<sup>34</sup>**

**Pertama**, perlu dipahami dalam konteks latar belakang histories. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa.

**Kedua**, faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.

<sup>33</sup> Ridwan, Moh. 1997. *Perilaku Politik NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*. Skripsi.

<sup>34</sup> Asep Ridwan, *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004*, Jurnal Demokrasi dan HAM Jakarta : The Habibie Center, 2000, hal. 25.

**Ketiga**, factor budaya politik memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat. Berfungsinya budaya politik ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dan struktur politiknya. Kemajuan budaya Indonesia memengaruhi budaya budi bangsa. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk memahami perilaku politik.

**Keempat**, perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan merupakan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai agama dan keyakinannya proses politik dan partisipasi warga negara paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.

**Kelima**, pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadarannya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya.

**Keenam**, factor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

**Ketujuh**, factor lingkungan social politik. faktor ini mempengaruhi aktor politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman. Lingkungan sosial politik saling mempengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lain dan bukannya sebagai factor yang berdiri sendiri.

Selain faktor-faktor diatas ada lima faktor lain yang memainkan peranan penting dalam menentukan pilihan rakyat, yaitu : standar hidup, kondisi gaji atau tidak digaji, kelompok umur, seks, tingkat pendidikan, agama, simpati terhadap partai politik.

### 5.3.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Perilaku politik dilihat sebagai sebuah alat analisis untuk melihat bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum, baik itu melalui pemberian suara (voting), keikutsertaan seseorang dalam kampanye, dan keanggotaan seseorang dalam partai politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilihat sebagai berikut.

#### 1. Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian<sup>35</sup>. Sebagaimana yang dikutip di dalam buku perilaku partai politik M.Khoirul Anwar<sup>36</sup>, kampanye juga dapat diartikan sebagai strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang di programkan oleh partai politik. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. Kampanye pemilu merupakan kampanye jangka pendek, yang mana ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan mengarahkan opini public dalam waktu singkat.

Menurut Lock dan Harris<sup>37</sup> didalam Firmanszah kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat secara luas. Image

<sup>35</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>36</sup> Anwar, Khoirul, *Perilaku Partai Politik*, Penerbit : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, hal.40.

<sup>37</sup> Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal.272-274.

politik yang akan dibangun harus memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan para pesaing. Kampanye pemilu yang merupakan aktifitas politik ditujukan untuk menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Sementara kampanye politik bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik. Image politik yang telah terbangun melalui proses interaksi terus menerus dengan masyarakat tidak mudah hilang dari memori kolektif masyarakat. Sedangkan janji dan harapan politik yang diberikan partai politik semasa kampanye pemilu hanya akan diingat, ditagih selama periode kepemimpinan partai tersebut kalau mereka memenangkan pemilu. Kampanye pemilu adalah sebahagian kecil dari kampanye politik. Meskipun suatu partai atau seorang kandidat tidak berada dalam periode kampanye pemilu, setiap ucapan, tindakan, bahasa tubuh, pemikiran dan aktivitas politik dianalisis oleh media massa dan masyarakat. Sebagaimana yang dituliskan Gelaman King dalam studinya menemukan bahwa preferensi pemilih akan kandidat tertentu sudah terbentuk jauh hari sebelum kampanye pemilu dimulai. Preferensi pemilih tidak dapat dibentuk hanya dengan kampanye yang bersifat jangka pendek.

Larl Popper dalam Dan Nimmo<sup>38</sup> mengemukakan tentang *Teori Pelopor Mengenai Opini Publik*, yang intinya para pemimpin menciptakan opini public karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian di pertimbangkan dan akhirnya diterima. Dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca apa keinginan masyarakat. Seorang calon pemimpin itu harus memiliki kemampuan baik dalam seni berbicara maupun akalanya. Kegiatan kampanye pemilu merupakan sebuah proses untuk mengajak masyarakat (konstituen) untuk bersedia menerima, mendukung dan memilih partai/calon yang diusung. Calon yang di usung ini harus memiliki kemampuan bahasa yang baik, menyampaikan pesan politiknya sesuai dengan keadaan masyarakatnya, misalnya berdasarkan demografisnya. Calon yang diusung pun harus memiliki target di dalam

<sup>38</sup> Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung : Remadja Rosda Karya, cetakan ke empat.

kampanye. Siapa-siapa saja yang hendak dijangkau, dan bagaimana strategi yang efektif, melalui media apa. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam kampanye ini calon harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jenis-jenis kampanye dapat dilihat sebagai berikut<sup>39</sup> :

1. Product-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah commercial campaign atau corporate campaign. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan financial.
2. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political campaigns (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.
3. *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social. Karena itu kampanye jenis ini disebut sebagai social change campaigns, yakni kampanye untuk menangani masalah-masalah social melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

<sup>39</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009, hal.11.

## **2. Pemberian Suara**

Richard G. Niemi dan Herbrt F.Weisberg<sup>40</sup> yang dikutip dalam komunitas embun pagi berpendapat bahwa faktor sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih seseorang, bukan karena karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis (terutama konsep sosialisasi dan sikap) untuk menjelaskan perilaku seseorang. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Maka dalam hal ini diperlukan “kurikulum sosialisasi politik”. Ini penting terutama bagi pemilih pemula yang cenderung belum pernah memilih. Harus dilakukan sosialisasi yang sistematis agar pemilih pemula ini dapat mengerti dan tidak menunjukkan karakter yang apatis (tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik), anomie (perasaan tidak berguna). Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinat dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

## **3. Partai Politik**

### **3.1 Defenisi Partai Politik<sup>41</sup>**

#### **1. Menurut Miriam Budhiardjo**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

<sup>40</sup> Richard G. Niemi dan Herbrt F.Weisberg, *Controversier of Voting Behavior* yang dikutip di dalam komunitas embun pagi.

<sup>41</sup> A. Rahman, *op.cit.*, hal. 102

## 2. Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

## 3. Menurut R.H. Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

### **3.2 Asal Usul Partai Politik**

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik<sup>42</sup>. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.

Teori yang pertama mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislative dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Masyarakat membentuk partai politik sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

<sup>42</sup> Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hal.113

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu system politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modrn yang berstruktur kompleks.pada situasi ini terjadi perubahan, penambahan penduduk, perluasa.

Teori ketiga melihat modernisasi social ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi dan lain-lain yang pada akhirnya mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Dengan demikian teori kedua dan ketiga memiliki kesamaan yakni partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya.

### **3.3 Perkembangan Partai Politik di Indonesia**

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang-surut seiring dengan perjalanan demokrasi. Berawal dari maklumat Wakil pemerintah No.X, 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakan titik awal terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Pergeseran sistem kepartaian di Indonesia berawal dari multipartai (pada masa awal kemerdekaan) hingga kembali lagi ke sistem multiparatai di era reformasi. Dalam perjalanannya terjadi proses penyederhanaan kepartaian pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Struktur kepartaian kini kembali lagi ke sistem multipartai seiring dengan bergulirnya reformasi politik pasca rezim Orde Baru berkuasa. Dengan demikian, sejarah pergeseran sistem kepartaian di Indonesia adalah dari multipartai ke multipartai<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal. 101.



### **3.3.1 Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan konsep partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia. Konsep yang disampaikan Soekarno ini merupakan kelanjutan dari pengembangan pemikiran-pemikirannya tentang kekuatan masyarakat sejak tahun 1920. Saat itu partai politik tunggal sebagai partai politik revolusioner merupakan pendukung utama kekuatan social politik. Namun, pemikiran Soekarno tentang partai tunggal ini tidak sempat terealisasi. Pemerintah, melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pendirian partai politik. Makna maklumat ini tidak sejalan dengan ide pendirian partai tunggal.

Kehadiran Maklumat Wakil Presiden No.X pada 3 November 1945 diikuti tumbuhnya partai politik yang didirikan berbagai kelompok masyarakat. Perkembangan kehidupan multipartai pada saat itu diwarnai konflik antarpolitical politik. Pasca pemilu 1955 pemerintahan dengan struktur politik multipartai itu juga belum menunjukkan stabilitas politik. Hal ini dapat dilihat dari masih pendeknya usia cabinet yang tidak mencapai dua setengah tahun. Berdasarkan pengalaman itu, penerapan sistem pemerintahan parlementer berpaduan dengan sistem multipartai di Indonesia melahirkan instabilitas politik. Perpaduan itu memiliki karakteristik rendahnya tingkat pelembagaan kepartaian, ketidakstabilan pemerintahan, dan kemunculan koalisi pemerintahan sebagai akibat dari sulitnya mencapai suara mayoritas di parlemen<sup>44</sup>.

### **3.3.2 Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**

Era Demokrasi Terpimpin menampilkan sosok Soekarno sebagai pemimpin nasional yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Perkembangan selanjutnya, Soekarno mulai melakukan langkah penyederhanaan sistem kepartaian. Maklumat pemerintah No.X, 3

<sup>44</sup> *ibid.*, hal 108-110

November 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Penpres No.7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, kemudian diperkuat dengan kehadiran Penpres No.13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Sejak itu berakhirilah maklumat yang mempunyai nilai demokratis dan fondasi pelebagaan system multipartai di Indonesia. Setelah Penpres No.7 dikeluarkan dan Penpres No.13 dikeluarkan, kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian oleh Soekarno semakin kuat dan tegas melalui Keputusan Presiden tentang Keberadaan Partai Politik.

Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin system kepartaian mengalami perubahan drastic dengan jumlah partai politik sebanyak sepuluh partai yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti.

### **3.3.3 Masa Orde Baru (1966-1998)**

Pada masa orde baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto terjadi penyederhanaan partai politik. Dengan alasan agar lebih mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa partai harus kehilangan identitasnya masing-masing atau dibubarkan sama sekali. Pengelompokkan ini mencakup tiga kelompok, yaitu Golongan Nasional, Golongan Spritual, dan Golongan Karya<sup>45</sup>. Pengelompokkan dalam tiga golongan baru terjadi pada tahun 1973. Partai-pratai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (gabungan NU, PSII, PMI dan Perti), sedangkan PNI, PARKINDO, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai politik, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pada masa orde baru terjadi penyederhanaan yang lebih ketat lagi dibandingkan pada masa demokrasi terpimpin.

<sup>45</sup> Miriam Budiardjo, *ibid.*, hal 275.

### 3.3.4 Masa Reformasi (1999-2004)

Reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dan pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden diikuti dengan perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi pada masa pemerintahan Habibie, jumlah partai politik tidak dibatasi dan bebas menentukan asas partai. Kebebasan mendirikan partai ini dilembagakan dalam UU No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Perubahan ini sekaligus merupakan awal dan tumbuhnya kembali multipartai di Indonesia. Pada Pemilu 1999 ada 48 partai politik yang memenuhi syarat dapat mengikuti Pemilu 1999. Dan pada tahun 2004 ada sebanyak 24 partai politik<sup>46</sup>.

**TABEL 4**  
**PERGESERAN JUMLAH PARTAI POLITIK di INDONESIA (1973-2009)**

Periode	Lolos Verifikasi Administratif	Peserta Pemilu	Masuk Parlemen
Orde Baru (1973-1997)	3	3	3
Reformasi (Mei 1998-Pemilu 1999)	148	48	19
Reformasi (1999-pemilu 2004)	50	24	16
Reformasi (2004-2009)	51	38	9

**Sumber:** diolah dari [http://www.kpu.go.id/partai-partai/jumlah\\_parpol.htm](http://www.kpu.go.id/partai-partai/jumlah_parpol.htm).

### 3.4 Tujuan dan Fungsi partai politik<sup>47</sup>

Tujuan partai politik dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagian warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
- 2) Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.

<sup>46</sup> Ign. Ismanto dkk, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 : Dokumen Analisis, dan Kritik, 2004* dalam Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, 2010., hal. 118.

<sup>47</sup> A. Rahman, *op.cit.*, hal. 103-104.

- 3) Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
- 4) Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideology dan kepentingan yang sama.

Fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik meliputi :

- 1) Sosialisasi Politik, adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.
- 2) Partisipasi Politik, adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik.
- 3) Komunikasi Politik, adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa.
- 4) Artikulasi Kepentingan, adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan kepentingan konstituen kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.
- 5) Agregasi Kepentingan, merupakan fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislative dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
- 6) Pembuat Kebijakan, merupakan fungsi yang dimiliki partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan dalam

pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislative. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

### **3.5 Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik<sup>48</sup>.

#### **3.5.1 Perjalanan Sistem Kepartaian**

Perjalanan kepartaian di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan demokrasi. Pergeseran system kepartaian di Indonesia berawal dari multipartai (pada masa awal kemerdekaan) hingga kembali lagi ke system multipartai di era reformasi. Dalam perjalanannya terjadi proses penyederhanaan kepartaian pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Struktur kepartaian kini kembali lagi ke system multipartai seiring dengan bergulirnya reformasi politik pasca rezim Orde Baru berkuasa. Dengan demikian, sejarah pergeseran system kepartaian di Indonesia adalah dari multipartai ke multipartai. System kepartaian menjadi sebuah mekanisme perwakilan yang mencerminkan keanekaragaman kepentingan dan aspirasi di masyarakat. Komposisi masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan cukup tinggi ini paling cocok dan representative dengan system multipartai. Harapannya, system multipartai lebih mampu mencerminkan kekuatan-kekuatan di masyarakat<sup>49</sup>.

Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 124

<sup>49</sup> Hanta Yuda, *op.cit.*, hal 101-103

kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Peter Mair mengklasifikasikannya dalam tabel berikut<sup>50</sup>.

**TABEL 5**  
**SISTEM KEPARTAIAN**

PENELITI	KRITERIA KLASIFIKASI	SISTEM KEPARTAIAN
Giovani Sartori (1976)	Jumlah Partai Jarak ideologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System dua partai</li> <li>• Pluralisme moderat</li> <li>• Pluralisme terpolarisasi</li> <li>• System partai berkuasa</li> </ul>

*Sumber: Peter Mair (1996) dalam wikipedia*

Dalam tipologi Sartori<sup>51</sup>, dia mengansumsikan hanya ada satu arena persaingan politik. Dengan demikian ia mengabaikan kemungkinan pemisahan antara arena Pemilu dan arena legislative, termasuk arena pemerintah. Sartori berargumen bahwa hasil-hasil pemilu akan menentukan tindakan partai di arena legislative. Dengan kata lain, Sartori mengandaikan perilaku partai dalam dua arena tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Berbagai keuntungan di arena Pemilu akan membentuk perilaku partai di arena legislative. Partai-partai parlemen dengan demikian dilihat sebagai konsekuensi dari kebutuhan untuk bertarung dan memenangi pemilu. Partai-partai di legislative sebahagian besar muncul sebagai akibat dari nilai fungsional partai pada waktu Pemilu. Konsep Sartori tentang jarak ideologis untuk menggambarkan interaksi antar partai di arena persaingan yang berbeda.

<sup>50</sup> Peter Mair, *Party Systems and Structures of Competition*, dalam Lawrence LeDuc, ed., et.al., *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, (California: Sage Publications, 1996) p.93 dalam Wikipedia.

<sup>51</sup> Kuskridho Ambardi, *Op.cit.*, hal.11-15.

Dengan demikian sangat mungkin berbagai partai politik memperlihatkan polarisasi ideologis di satu arena dan kemudian bersekutu di arena lain.

## **5.4 Perilaku Memilih (*Voting Behavior*)**

Studi-studi perilaku memilih (*voting behavior studies*) dalam suatu pemilu memiliki dua pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Dalam penelitian ini saya menggunakan tiga pendekatan yaitu :

### **5.4.1 Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini pada dasarnya menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial itu mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakter dan pengelompokan sosial berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, status-sosial, ekonomi, aspek geografis dan lain sebagainya<sup>52</sup>. Hal ini dianggap mempunyai peranan cukup menentukan dalam bentuk perilaku pemilih. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis (terutama konsep sosialisasi dan sikap) untuk menjelaskan perilaku memilih seseorang. Aliran yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis voting behavior ini menyatakan bahwa preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kotak pemilihan seseorang merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi di mana dia berada seperti profesi, kelas sosial, agama dan seterusnya. Dalam status social ekonomi terdapat beberapa indicator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hal.145.

<sup>53</sup> Damsar, *op.cit.*, hal 200.

Gerald Pomper<sup>54</sup> memperinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian *voting behavior* ke dalam dua variabel yaitu predisposisi (kecenderungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, terutama pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Apakah preferensi politik ayah atau ibu berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama merupakan faktor sosiologis paling kuat dalam mempengaruhi sikap pilihan terhadap partai-partai politik. Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir di dalam kehidupan privat dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Hal ini biasanya berhubungan dengan status ekonomi seseorang. Affan Gaffar menunjukkan bahwa pengaruh kelas dalam perilaku pemilih di Indonesia tidak begitu dominant<sup>55</sup>. Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama tetap merupakan faktor sosiologis yang sangat kuat dalam mempengaruhi sikap pemilih terhadap partai politik atau kandidat. Dalam hal ini agama diukur dari afiliasi pemilih terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Partai Islam adalah partai yang secara eksplisit dan formal menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang didasarkan atas asas Islam. Dalam hal ini, PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Partai Masyumi, dan lain-lain, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Tapi ke dalam partai Islam dapat pula dimasukkan partai-partai yang secara sosiologis berakar dalam organisasi sosial keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah walaupun partai-partai tersebut secara eksplisit menyatakan partai terbuka terhadap pemeluk agama-agama lain, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam.

<sup>54</sup> Gerald Pomper, *Voter's choice : Varieties of American Electoral Behavior*, New York : Dod, Mead Company, 1978, hal 198.

<sup>55</sup> A.Rahman Zainuddin, *Op.cit.*, hal 48-49



Dengan karakteristik keagamaan seperti di atas suatu hipotesis tentang pilihan atas partai politik dapat dinyatakan seperti ini: pemilih yang beragama Islam cenderung akan memilih partai-partai Islam (PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Masyumi, PKB, dan PAN), sementara pemilih non-Islam cenderung akan memilih partai-partai non- Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP). Asumsinya bahwa para pemilih yang beragama Islam akan cenderung memilih partai-partai Islam. Yang beragama Kristen akan memilih partai Kristen, dan seterusnya<sup>56</sup>.

#### **5.4.2 Pendekatan Psikologis**

Menurut penganut pendekatan psikologis, secara metodologis pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti sebagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas social, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan psikologis lebih menekankan faktor-faktor psikologis dalam menentukan perilaku politiknya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan Psikologis menjelaskan bahwa sikap seseorang (sebagai refleksi kepribadian seseorang) merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Melalui proses sosialisasi individu dalam mengenali sistem politik yang kemudian

<sup>56</sup> Liddle, William dan Saiful Mujani, “ Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik”, Kompas, 1 September 2000.

menentukan sifat persepsi politiknya di dalam pemilihan umum, sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

### **5.4.3 Pendekatan Pilihan Rasional**

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, sosialisasi, pengalaman hidup merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi politik seseorang. Ada faktor situasional yang mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan. Isu-isu politik ini menjadi bahan pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik. Artinya pemilih pemula dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional<sup>57</sup>. Pendekatan rasional membawa kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena factor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis.

<sup>57</sup> M.Asfar, "Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih", Jurnal Ilmu-Ilmu Politik, Vo. 16, Jakarta : PT. Gramedia, 1989.

## **6. Metodologi Penelitian**

### **6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini sebagaimana dikemukakan Nazir didalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian*<sup>58</sup> menyatakan bahwa, pengertian deskriptif adalah "suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penelitian sikap, atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan, survey, wawancara atau observasi<sup>59</sup>.

### **6.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Dataran Tinggi Binjai Timur.

### **6.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diterapkan kesimpulannya. Populasi mempunyai lambang (N)<sup>60</sup>. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di kelurahan Dataran Tinggi Binjai Timur.

Sampel adalah sebahagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan populasi yang bersifat heterogen atau tidak homogen, maka pada

<sup>58</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998.

<sup>59</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal.8

<sup>60</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2003,h.65.

teknik penarikan sampel menggunakan Teknik Proportionate Stratified Random Sampling yakni polulasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional.

Penulis menggunakan rumus Taro Yamane, yaitu :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = presisi, ditetapkan 10 % dengan derajat kepercayaan 90%.

Jumlah pemilih masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Dataran Tinggi Binjai berjumlah 3620 orang.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{3620}{3620 \times (0,01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{3620}{36,2 + 1}$$

$$n = \frac{3620}{37,2}$$

**n = 97,3 atau 97 orang**

#### **6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, ataupun informasi-informasi, keterangan dan fakta-fakta.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen dari kelurahan dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan, yaitu dengan pengumpulan data dengan cara terjun ke lokasi, dengan menggunakan metode kuesioner tertutup (angket).

#### **6.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Nazir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **7. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi penulisan skripsi ini dalam IV Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, asumsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi, kerangka teori, metodologi dan sistematika penulisan.

### **BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Isi Bab ini meliputi gambaran secara umum kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur seperti letak geografis, batas wilayah, dan mengenai demografinya.

### **BAB III : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Bab ini berisikan penyajian data dan analisis data-data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden.

### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian.